



INFO Singkat

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Vol. VI, No. 01/I/P3DI/Januari/2014

Kajian Singkat terhadap Isu-isu Terkini

BANJIR JAKARTA 2014

Teddy Prasetiawan*)

Abstrak

Banjir kembali melanda Jakarta, tepat di tahun politik 2014. Tidak sedikit pihak-pihak tertentu yang menjadikan isu banjir Jakarta sebagai komoditas politik menjelang pemilu. Sebagai warga negara yang berkepentingan terhadap keamanan Jakarta sebagai ibukota negara dan melaksanakan sebagian besar aktivitasnya di Jakarta, penting bagi kita untuk memahami permasalahan banjir Jakarta secara utuh agar tidak mudah terpelintir isu yang mengarah kepada perdebatan yang nonsubstantif.

Pendahuluan

Banjir kembali melanda Jakarta di awal tahun 2014 ini. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, topik banjir menjadi hangat di berbagai media saat kejadian berlangsung. Namun perlahan-lahan menghilang seiring dengan surutnya air. Hingga pertengahan Januari ini, Jakarta masih dalam status Siaga IV yang ditentukan berdasarkan ketinggian air di sejumlah pintu air yang masih dalam kondisi aman, seperti Pintu Air Pesanggrahan yang berstatus Siaga IV dan Pintu Air Manggarai serta Angke Hulu yang masih Siaga III. Meskipun demikian, masyarakat Jakarta dan sekitarnya telah merasakan dampak dari bencana banjir kali ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan jumlah pengungsi sampai 15 Januari 2014 tercatat sebanyak 2.761 warga dan tersebar di 20 lokasi pengungsian. Sedangkan, jumlah warga yang terdampak banjir sebanyak 2.925 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 10 kecamatan dan 18 kelurahan.

Menariknya, banjir kali ini bertepatan dengan tahun politik, yaitu pemilihan umum 2014. Banjirpun menjelma menjadi komoditas politik bagi beberapa pihak dalam menaikkan popularitas atau bahkan justru menurunkan popularitas lawan politik. Ada yang membandingkan antara kejadian banjir yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan saat ini, ada pula yang mengkritisi program yang sedang berlangsung yang dinilai gagal oleh pemerintahan saat ini, atau malah mengonfrontasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi yang berakhir dengan saling lempar tanggung jawab.

Lalu apa yang sebenarnya telah dan akan dilakukan pemerintah terkait masalah banjir di Jakarta hingga saat ini? Jakarta merupakan ibukota negara yang sebagian urusannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan sebagiannya lagi menjadi murni tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa kalangan menilai

*) Peneliti Muda bidang Kebijakan Lingkungan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail:teddy@dpr.go.id

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

bahwa upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masih kurang maksimal sehingga saat musim penghujan Jakarta tetap mengalami banjir.

Sekilas Penanggulangan Banjir di Jakarta

Sebelum menilai lebih jauh tentang upaya penanggulangan banjir di Jakarta, ada baiknya kita memahami perjalanan panjang kota yang dahulu hanya merupakan pelabuhan kecil bernama Kelapa yang kemudian berganti-ganti nama menjadi Jayakarta, Jaktra, Batavia, dan akhirnya Jakarta dalam upayanya menghadapi bencana banjir.

Sejak dahulu Jakarta telah menjadi langganan banjir. Pada saat Kota Batavia didirikan pada tahun 1619, telah mulai dibangun sistem kanal yang menyerupai sistem di Amsterdam. Berbagai macam solusi diimplementasikan untuk mengatasi kondisi tersebut. Namun seiring dengan upaya pencegahannya, kejadian banjir besar terus berlangsung secara berulang dengan intensitas yang semakin mengkhawatirkan. Sejarah mencatat kejadian banjir besar di Jakarta paska kemerdekaan terjadi pada tahun 1979, 1996, 1999, 2002, 2007, atau yang terakhir pada awal 2013 lalu.

Letaknya yang berada di tepi Laut Jawa yang dialiri oleh 13 sungai merupakan faktor utama penyebab kejadian banjir. Bahkan data terbaru tahun 2010 menyatakan sebanyak 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Data ini keluar berdasarkan hasil penelitian konsorsium *Jakarta Coastal Defence Strategy* (JCDS), sebuah studi persiapan untuk membuat tanggul atau dam raksasa di Pantai Utara Jakarta. Ditambah lagi dengan kondisi kepadatan penduduk sangat tinggi, peningkatan jumlah tutupan lahan, penurunan jumlah lahan resapan, dan penurunan muka air tanah menyebabkan Jakarta seperti tidak mungkin menghindari diri dari bencana banjir.

Usaha-usaha mengatasi banjir sebetulnya juga sudah dipikirkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1920 Prof H. van Breen dari BOW (cikal bakal Kementerian Pekerjaan Umum) merilis gagasan untuk membangun dua saluran kolektor yang mengepung kota guna menampung limpahan air, yang selanjutnya akan dialirkan ke laut. Saluran pertama

menyusuri tepian barat kota, yang kedua melalui tepian timur kota. Karena tepian barat lebih dekat dengan pusat Kota Batavia maka saluran di tepian barat dulu yang dibangun dengan nama Kanal Kali Malang pada tahun 1922. Kanal Kali Malang ini kemudian dikenal Kanal Banjir Barat (KBB) antara Manggarai-Muara Angke sepanjang 17,4 km. Rencananya Kanal Banjir Barat ini akan diperluas tapi karena sulitnya membebaskan tanah, perluasan Kanal Banjir Barat tertunda.

Sebagai gantinya dibuatlah jaringan pengendali banjir lainnya, yakni jaringan kanal dan drainase yang dinamakan Sistem Drainase Cengkareng. Kanal Banjir Barat hanya mampu menampung sampai 370 meter kubik per detik. Pemerintah telah membangun *Cengkareng Drain*, *Cakung Drain*, Sudetan Kali Sekretaris sepanjang tahun 1983 hingga 1985. Sedangkan saluran tepian ke timur tidak sempat terbangun karena Perang Dunia ke-2. Baru dengan bantuan *Netherlands Engineering Consultants*, tersusunlah "*Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta*" pada Desember 1973. Rancangan ini didetailkan lagi lewat desain *Nippon Koei* pada 1997. Penggalan untuk Kanal Banjir Timur baru dimulai pada tahun 2003. Panjang Kanal Banjir Timur (KBT) ini 23,6 kilometer dengan daya tampung limpahan air 390 meter kubik per detik. Selain itu, KBT juga dilengkapi dengan sistem kolam sedimen berukuran 300 x 350 meter kubik di kawasan Ujung Menteng. Sistem kolam ini berguna untuk menangkap sedimen agar badan kanal tetap leluasa.

Hingga saat ini, upaya penanggulangan banjir tetap dan terus dilakukan di Jakarta dengan segala perkembangan dan segala kekurangannya. Mulai dari membangun polder, membangun tanggul, normalisasi sungai, membangun kanal, membangun waduk sementara, membuat sudetan, tengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Begitu pula dengan rencana revisi tata ruang, revisi masterplan tata air Jakarta, atau pemberlakuan *zoning policy*, yang tidak hanya melingkupi Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga melibatkan wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) serta turut melibatkan pihak swasta, melalui dokumen Masterplan Megapolitan.

Pada masa yg akan datang, Pemerintah Provinsi DKI bekerjasama dengan Kementerian PU berencana untuk membangun infrastruktur air baru selain optimalisasi yang dilakukan terhadap infrastruktur yang telah ada, diantaranya adalah sodetan ciliwung dan *giant sea wall*.

Mengapa Sulit Menghalau Banjir?

Meskipun dengan beragam rencana di atas, banjir Jakarta masih belum dapat diatasi hingga saat ini. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pembebasan lahan yang bermasalah;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah; dan
3. Kerjasama antar pemerintah daerah kurang berjalan.

Normalisasi sungai, waduk, atau pembangunan infrastruktur pengendalian banjir lainnya seringkali berhadapan dengan keterbatasan lahan. Banyaknya permukiman liar di bantaran sungai atau lahan kosong yang diperuntukkan sebagai daerah resapan membuat upaya pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan menjadi tidak mudah. Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan memperhalus kata "menggusur" dengan kata "memindahkan" warga itu ke rumah susun (rusunawa). Proses ini tentunya membutuhkan waktu dan dana, namun tetap harus dilakukan. Sebab, selama normalisasi sungai dan waduk tidak dilakukan maka banjir akan tetap berlangsung di Jakarta.

Kepedulian masyarakat Jakarta pun dinilai masih rendah dalam turut mengatasi banjir. Permasalahan sampah yang menumpuk di saluran drainase dan badan air seakan tidak pernah terentaskan. Memang permasalahan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada masyarakat, karena hal ini merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Pengangkutan sampah di DKI Jakarta telah lama menerapkan sistem swastanisasi. Kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pengangkutan sampah oleh pihak swasta harus lebih dioptimalkan, terutama dalam mengatasi sampah yang berada di saluran drainase dan badan air.

Selain itu, keberadaan Badan Kerja Sama Antarprovinsi (BKSP) dinilai belum efektif. Lembaga ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan Jakarta dan sekitarnya, terutama banjir dan kemacetan.

Kenyataannya, setelah lebih dari tiga dekade terbentuk, badan tersebut belum memperlihatkan prestasi yang signifikan. BKSP terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lembaga ini diketuai gubernur secara bergiliran dan dijalankan kepala sekretariat eselon II-B. Lembaga BKSP seharusnya memiliki kewenangan lebih dalam membuat rencana bersama dalam upaya mengatasi tidak hanya masalah banjir tetapi juga masalah defisit air yang dialami kota seperti Tangerang. Sehingga kelebihan air (banjir) dapat diatasi dengan menyuplai air yang dapat terwujud tentunya melalui perencanaan terpadu tata air yang melibatkan tiga pemerintah provinsi tersebut.

Politisasi Banjir

Berkaitan dengan banjir yang terjadi tahun ini yang bertepatan dengan Pemilihan Umum 2014, perlu dipahami sebelumnya bahwa kejadian hujan memiliki variabel yang acak (*random*) yang frekuensi dan intensitasnya tidak dapat dipastikan dengan teknologi mutakhir sekalipun. Saat berbicara banjir, maka kita berbicara tentang sebuah kejadian yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Membandingkan kejadian banjir yang terjadi pada era kepemimpinan Gubernur Sutiyoso atau Fauzi Bowo dengan yang terjadi pada era kepemimpinan Joko Widodo tidak dapat dilakukan dengan sekedar menghitung jumlah korban, jumlah pengungsi, atau luas wilayah yang terkena banjir saja. Perlu pula membandingkan intensitas hujan yang terjadi pada masing-masing kejadian atau kondisi tutupan lahan dan luasan lahan resapan yang ada pada saat itu.

Seperti berita yang dilansir pertengahan Januari ini yang memberikan penilaian bahwa titik banjir di zaman Foke selama 5 tahun hanya berhasil mengurangi banjir Jakarta sebanyak 21%. Sementara Jokowi berhasil mengurangi banjir Jakarta sebanyak 44% hanya dalam waktu 1 tahun. Berita ini bertendensi menjadikan banjir sebagai upaya untuk meningkatkan citra salah satunya karena perbandingan yang dilakukan menggunakan dasar yang keliru. *Pertama*, perbandingan yang dilakukan di tanggal yang sama di tahun yang berbeda dinilai keliru karena belum tentu berada pada pucuk hujan yang sama. *Kedua*, banjir tahun 2014 masih terus berlangsung sehingga terlalu dini untuk menilai puncak

kejadian banjir tahun ini.

Begitu pula beberapa pertentangan yang mengemuka antara Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang cara penanganan banjir. Gubernur Joko Widodo pernah mengatakan bahwa saluran dan kanal di Jakarta akan terus diperbaiki dan dikeruk. Tetapi hal itu tidak akan cukup. Air harus juga diserap sebanyak mungkin ke dalam tanah. Di hulu, air harus dicegat dengan menampungnya dalam reservoir atau diserap oleh lebih banyak lahan berhutan. Di wilayah Jakarta (hilir), penyerapan air dapat dimaksimalkan dengan sumur resapan dan biopori secara masif. Berseberangan dengan hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai proyek sumur resapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kurang efektif karena hanya dapat meredam banjir untuk jangka pendek.

Begitu pula dengan kontroversi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Banyak pihak menilai bahwa anggaran yang dialokasikan terlalu besar dengan nilai manfaat yang tidak begitu terasa atau menilai kualitas air hujan yang turun berbahaya bagi manusia. Namun, secara tegas BPPT menyanggah bahwa air hujan hasil proses TMC tidak berbahaya bagi manusia karena zat yang digunakan untuk mempercepat hujan turun sebelum awan memasuki kawasan Jakarta adalah garam kalsium klorida (CaCl) yang sama sekali tidak berbahaya bagi makhluk hidup.

Mungkin sulit bagi kita untuk mengukur kontribusi yang dihasilkan oleh sumur resapan atau TMC dalam rangka mengurangi banjir. Namun pada prinsipnya, segala upaya pengurangan potensi banjir di Jakarta sangat dibutuhkan untuk menutupi beberapa program yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk menyangsikan kemanfaatan dari upaya penanggulangan banjir yang telah terbukti secara ilmiah, baik sumur resapan maupun TMC.

Hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan mendera Jakarta hingga tiga setengah bulan ke depan. Masyarakat dijamin akan sering menyaksikan berita-berita tentang banjir yang sedikit dipelintir menjadi komoditas politik tanpa dasar ilmiah dan menyentuh substansi masalah. Hal yang perlu diketahui bahwa masih terjadinya banjir di Jakarta tidak langsung membuat kita memvonis

pemimpinnya bersalah dan keberhasilan penanganan banjir juga bukan menjadi prestasi satu orang semata.

Penutup

Terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah, sikap mental yang harusnya dimiliki oleh masyarakat Jakarta, termasuk pemangku kebijakan dan politisi, adalah paham bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat, paham bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, dan paham bahwa persoalan banjir tidak untuk dijadikan komoditas politik jelang pemilu 2014, melainkan untuk diantisipasi. Selagi normalisasi sungai, waduk, atau pembangunan infrastruktur pengendalian banjir terus berjalan, porsi luas ruang terbuka hijau dan daerah resapan terus ditingkatkan, masyarakat sadar lingkungan terus dibina, dan kerjasama antar pemerintah daerah tetap diupayakan, maka kita bersama sedang menuju Jakarta yang bebas banjir.

Rujukan

1. Joga Nirwono dan Ismaun Iwan. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
2. Caljouw Mark, Nas Peter J.M., dan Pratiwo. 2007. "Banjir di Jakarta: Menuju ke Suatu Kota Biru dengan Pengelolaan Air yang Baik", bagian dari buku *Kota-Kota Indonesia* (Bunga Rampai). Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
3. Prihatin, Rohani B. 2013. *Banjir Jakarta: Warisan Alam dan Upaya Pengendalian*. Insist-Press. Yogyakarta.
4. "Basuki, Mengam Saya yang Kontrol Katulampa", <http://megapolitan.kompas.com/> diakses pada 15 Januari 2014.
5. "Ini Kewajiban Kementerian PU Soal Banjir Jakarta", <http://megapolitan.kompas.com>, diakses pada 15 Januari 2014.
6. "40% Wilayah Jakarta di Bawah Laut", <http://metro.news.viva.co.id/>, diakses pada 7 Januari 2014.
7. "Kontroversi Sungai Ciliwung dan Kampung Deret", <http://green.kompasiana.com/>, diakses pada 6 Januari 2014.
8. "Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Curah Hujan dan Banjir di DKI Jakarta 2", <http://bpbd.jakarta.go.id/>, diakses pada 14 Januari 2014.